



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Periode 2020 - 2022)

Anhesa Rinta Deidrayanti Putri

Universitas Tidar

Ratna Sefitriya

Universitas Tidar

Risma Wira Bharata

Universitas Tidar

Alamat: Jalan Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: anhesarintad@gmail.com

Abstract. *Regional government as a party that is authorized to carry out government activities, development, and services to the community, and is obliged to submit regional financial accountability reports in the form of financial reports prepared based on Statement of Government Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statements. In addition to supervising cash or money matters, internal auditing of financial implementation in the regions also oversees the implementation of plans, activities and management of plans made by the regional government through their effectiveness and effectiveness which in turn can affect the health and financial performance of the region. This monitoring can be carried out by authorities in their respective fields for transparent and accurate reports on budget implementation. The sample in this research is the financial reports of the local government of Tegal Regency for the period 2020 to 2022 using a descriptive analysis method, which calculates the ratios used to measure government financial performance. The fiscal decentralization ratio of the Tegal Regency Government shows that the regional government is not yet included in the category of an independent region because the results of the calculation of this ratio show that the fiscal decentralization ratio fluctuates every year and the average is in the low category, this means that the local government have not been able to properly manage their own regional revenue sources.*

Keywords: *Local Government, Financial Performance*

Abstrak. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi

kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Sampel pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal periode 2020 hingga 2022 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dengan menghitung rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai salah satu cara akuntansi sebagai mekanisme analisis untuk penyelenggaraan dana publik di organisasi pemerintah dan non pemerintah, baik pada pemerintah pusat, lembaga tinggi negara dan departemen, lembaga pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, badan layanan publik yang berada di daerah, masyarakat, serta organisasi sosial dan lembaga sosial. Data-data yang digunakan dalam akuntansi sector publik berupa data akuntansi yang juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di dalam suatu sektor publik tersebut kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga masyarakat umum.

Akuntansi sektor publik juga merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik, melihat semakin banyaknya perhatian yang saat ini diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Badan akreditasi dituntut oleh masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel sehingga Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik, yang mana meliputi semua urutan dan tata cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit, hingga akuntabilitas publik. Standar-standar akuntansi yang dipakai di Indonesia antara lain Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Semua standar ini adalah referensi yang disetujui dan ditentukan oleh badan yang berhak di bidang yang sesuai. (GUNAWAN, 2015).

Sektor publik ialah organisasi atau instansi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut mengakibatkan keperluan informasi yang beragam

bagi manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Tanggungjawab serta tugas seorang akuntan sektor publik yaitu mempersiapkan informasi untuk keperluan internal dan eksternal. Sehingga akuntansi sektor publik dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti Pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh stakeholders. Akuntansi dan laporan keuangan adalah proses himpunan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang berguna dalam penetapan keputusan serta mengevaluasi kinerja.

Kinerja keuangan suatu perusahaan maupun pemerintahan didefinisikan sebagai peluang yang baik, potensi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Informasi ini dibutuhkan guna mengukur potensi perubahan sumber daya ekonomi yang bisa dikendalikan kedepannya dan memperkirakan kapasitas produksi sumber daya yang dimiliki (Barlian, 2003).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, juga seringkali digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, tentang SAP. Melalui SAP tersebut Pemda mulai tahun 2011 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya SAP menjadi era baru bagi perkembangan akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia.

Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah.

KAJIAN TEORITIS

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menysasar mereka yang membutuhkan untuk membuat keputusan ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan akuntansi sektor publik ialah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen atas suatu kegiatan yang benar, efisien, dan ekonomis, serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan untuk periode akuntansi untuk menggambarkan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas. (Munawir, 1983) menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi keuangan yang lebih dalam penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam sektor privat, sektor publik dan sektor nir laba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Larry D. Stout dalam Bastian, 2001:329). Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dengan menghitung rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Analisis deskriptif merupakan metode dengan menggunakan penjelasan mengenai studi kasus yang peneliti lakukan, dengan sampel yang telah disiapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan

Rasio	Indicator	Rumus Perhitungan Dan Referensi
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 0%-25%, tergolong rendah sekali dengan pola instruktif. 25%-50%, tergolong rendah dengan pola konsutatif. 50%-75%, tergolong sedang dengan pola partisipatif. 75%-100%, tergolong tinggi dengan pola delegatif. 	Rumus: $RKKDn = \frac{PADn}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Christia & Ispriyarso, 2019)
Rasio Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif. Jika nilainya sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang 	Rumus : $\text{Rasio Efektivitas PADn} = \frac{Realisasi PADn}{Anggaran PADn} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Jika r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan mengalami penurunan. Jika r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya. 	Rumus : $r = \frac{Pn - Po}{Po}$ Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan Pn= Pertumbuhan pada tahun ke-n Po= Pertumbuhan pada awal tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Kecerasan	<ul style="list-style-type: none"> Jika Rasio Belanja Operasi lebih besar 	Rumus : Rasio Belanja Modal =

	daripada rasio belanja modal maka, rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah rendah.	$\frac{\text{Total Belanja Modal } n}{\text{Total Belanja Daerah } n} \times 100\%$
	• Jika Rasio Belanja Operasi lebih kecil daripada rasio belanja modal, maka rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah tinggi.	Rasio Belanja Operasi $n = \frac{\text{Total Belanja Operasi } n}{\text{Total Belanja Daerah } n} \times 100\%$ (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • 0% - 10% : Sangat Rendah • 10.01%-20% : Rendah • 20.01-30% : Sedang • 30.01-40% : Cukup • 40.01-50% : Tinggi • >50% Sangat Tinggi 	Rumus: Rasio Desentralisasi Fiskal $= \frac{\text{realisasi}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ (Christia & Ispriyarso, 2019)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.. Pada tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020-2022. Hasil perhitungan RKKD pada Tabel 2 merupakan perbandingan antara realisasi PAD Kabupaten Tegal dan pendapatan transfer. Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut RKKD Pemerintah Kabupaten Tegal periode tahun anggaran 2020-2022 rata-rata menunjukkan angka 25,96% yang dapat diartikan bahwa kondisi kemandirian keuangan daerahnya bersifat konsumtif.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2020	439.931.567.174,60	1.697.875.551.939,00	25,91%	Konsutatif
2021	591.004.284.313,00	2.117.374.969.793,00	27,91%	Konsutatif
2022	531.112.252.855,50	2.206.619.044.546,00	24,06%	Instruktif
	Rata-Rata		25,96%	Konsutatif

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan semakin baik. Pada tabel 3 menunjukkan perhitungan rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020-2022, yang dimana dari hasil tersebut menunjukkan bahwasannya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tegal menghasilkan rata-rata sebesar 112,65%, hasil tersebut masuk ke dalam klasifikasi efektivitas yang sangat efektif. Sehingga dari klasifikasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2022 berada pada klasifikasi sangat efektif, yang artinya pemerintah Kabupaten Tegal telah memiliki kinerja keuangan yang baik melalui penyerapan penerimaan PAD guna pembiayaan jalannya pemerintahan.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2020	125.712.144.290	125.228.000.000	100,39%	Efektif
2021	591.004.284.313,00	469.765.165.000,00	125,81%	Efektif
2022	531.112.252.855,50	475.177.918.000,00	111,77%	Efektif
	Rata-Rata		112,65%	Efektif

Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan Kesehatan fiskal. Pada tabel 4 menunjukkan rekapilitasi rasio pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020-2022, semua rasio mengalami fluktuasi. Tabel 4 menunjukkan hasil yang

dimana pada tahun 2021 PAD dari Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi untuk tahun 2022 PAD dari Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 4. Rekapilitasi Rasio Pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasional, dan Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020-2022

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
PAD	439.931.567.174,60	591.004.284.313,00	531.112.252.855,50
Pertumbuhan PAD	-	34,34%	-10,13%
Belanja Operasional	1.683.573.672.389,52	1.905.870.135.761,00	1.893.724.316.872,00
Pertumbuhan Belanja Operasional	-	13,20%	-6,37%
Belanja Modal	248.977.818.850,00	368.877.462.091,00	313.682.560.331,00
Pertumbuhan Belanja Modal	-	48,15%	-14,96%

Rasio Keserasian

Analisis rasio ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja operasi dengan total belanja daerah. Sedangkan analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Perhitungan analisis rasio keserasian pada keuangan daerah Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2020-2022 ditunjukkan pada Tabel 5 dan 6. Hasil dari perhitungan pada tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa Total Belanja Daerah pada Kabupaten Tegal masih dikategorikan rendah untuk tahun anggaran 2020-2022.

Tabel 5. Rasio Keserasian Belanja Operasional Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran	Belanja operasional	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasional
2020	1.683.573.672.389,52	2.010.868.784.570,52	8,37%
2021	1.905.870.135.761,00	2.285.151.931.627,00	83,40%
2022	1.893.724.316.872,00	2.207.928.151.237,00	85,76%

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2020	248.977.818.850,00	2.010.868.784.570,52	12,38%
2021	368.877.462.091,00	2.285.151.931.627,00	16,14%
2022	313.682.560.331,0	2.207.928.151.237,00	14,20%

Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada aspek keuangan daerah. Semakin tinggi angka realisasi PAD dibandingkan dengan total APBD, maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah mandiri. Daerah mandiri mampu mengelola sumber-sumber PADnya. Angka total APBD merupakan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh secara sah. Hasil dari perhitungan pada Tabel 7 Kabupaten Tegal pada periode tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berada pada posisi yang rendah.

Tabel 7. Rekapitulasi Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	APBD	Rasio Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2020	439.931.567.174,60	2.651.771.838.697,60	16,59%	Rendah
2021	591.004.284.313,00	2.862.559.366.052,00	20,64%	Sedang
2022	531.112.252.855,50	2.743.662.500.401,50	19,35%	Rendah
	Rata-Rata		18,86%	Rendah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat masih tergolong rendah dengan pola konsultatif. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengelola PAD menunjukkan bahwasannya kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk merealisasikan PAD menghasilkan hasil yang memuaskan. Pada rasio pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan pada Tabel 4. Kondisi tersebut disebabkan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Sedangkan untuk rasio keserasian menunjukkan hasil yang dimana belanja operasional daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal.

Pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber PADnya dengan baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih rinci dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jangka waktu penelitian dapat lebih diperpanjang.

Daftar Pustaka

- 23, U.-U. N. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2(1).
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7,83-112.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram . *Distribusi-Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabipaten Tegal Periode 2016-2019). *Jurnal Maksipreneur*, 303-314.